

**ANALISIS PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF
DITINJAU MENURUT FIQIH JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H. I)



Oleh

MUKHPIZAR
NIM. 10524001123

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Terhadap Pidana Mati Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Fiqih Jinaya**”, dengan maksud untuk mengetahui bagaimana sejarah perubahan pelaksanaan hukum positif, dan analisis terhadap pidana mati dalam hukum positif ditinjau menurut fiqh jinayah

Latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah, sebagaimana kita ketahui pelaksanaan pidana mati dalam hukum positif Indonesia, dilaksanakan dengan cara ditembak mati, artinya pelaksanaan pidana mati tersebut tidak dipublikasikan didepan khalayak ramai. Dalam hukum pidana islam, pidana mati itu dilaksanakan dengan cara dipancung, dilempar dengan batu (*Rajam*) dan pelaksanaan pidana matinya dilakukan didepan orang ramai artinya pelaksanaan pidana mati itu publikasikan di khalayak ramai.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Deskriptif Analisis*, maksudnya dalam penelitian ini penulis menggambarkan (*Mendiskripsikan*) sebuah fenomena yang terjadi dan selanjutnya penulis menganalisisnya berdasarkan data yang penulis temukan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Library Research* (Study Kepustakaan) yaitu dengan cara mengumpulkan literature-literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Seluruh data yang penulis peroleh, penulis olah dengan menggunakan metode ***Content Analysis*** (Analisis Isi) yaitu satu teknik analisa dalam kajian *Kepustakaan* dengan cara menganalisis terhadap berbagai sumber informasi termaksud bahan cetak (buku, artikel, Koran, majalah dan sebagainya). Pada kesimpulan akhir penulis akan melihat pelaksanaan antara dua hukum tersebut (Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)

Berdasarkan analisa penulis, maka diketahui Dari sejarah telah banyak mengalami perubahan dan pada akhirnya lahirnya penpres No. 2 Tahun 1964 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No. Tahun 1969 dan berlaku hingga sekarang., dan tujuan pelaksanaan mati tersebut ialah memberikan pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, dan perlindungan terhadap umum. secara teoritis pelaksanaan pidana mati tidak didepan publik tetapi menggunakan media secara menyorot pelaksanaan tersebut atau dapat mengurangi kejahatan karena dipengaruhi sifat oleh hakikat sanksi dan sebuah kepastian sanksi.

Kesimpulan dari kajian ini penulis peroleh dari penggabungan data dan ditambah dengan menganalisis teori media antara lain *Teori* membangun *Image* kepada publik, kemudian *Teori Imagalogi* yaitu sebuah teori yang menggunakan visualitas gambar dan suara dalam menyampaikan kabar berita atau menyampaikan sebuah fenomena dan *Teori Publisistik* yaitu sebuah teori tentang kegiatan komunikasi antara seseorang (Komunikator) dengan orang banyak (komunikan), atau kegiatan komunikasi antara suatu lembaga penyebar berita dan pendapat melalui penggunaan media dengan komunikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Teori Pembangunan	12
B. Teori Imagalogi.....	16
C. Teori Publistik.....	17

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI MENURUT HUKUM

POSITF DAN HUKUM ISLAM

A. Padangan Fakar Hukum Atas Pidana Mati	19
--	----

B. Macam Tindak Pidana Mati Menurut Hukum Positif.....	22
C. Macam Tindak Pidana Mati Menurut Hukum Islam	28
D. Eksekusi Menurut Hukum Positif.....	42
E. Eksekusi Menurut Hukum Islam	46

BAB IV PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF

DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Sejarah Perubahan Yang Mendorong Perubahan Pelaksanaan Pidana Mati	57
B. Bagaimana Analisis Terhadap Pidana Mati Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana adalah suatu nestapa¹ yang ditimpakan negara kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. pihak yang dapat menimpakan nestapa itu tidaklah setiap orang, tetapi adalah kewenangan dari negara untuk dapat menimpakan atau menjatukannya kepada orang yang melakukan tindak pidana

Pidana itu haruslah memberikan manfaat, sehingga memberikan preventif yang ditunjukan kepada pelaku tindak pidana itu, artinya bagi pelaku tindak pidana dengan dijatukannya pidana, dia menjadi takut untuk melakukan lagi tindak pidana pada masa yang akan datang.

Di sisi lain, manfaat pidana tersebut juga dapat mencegah masyarakat melakukan tindak pidana, artinya dengan dijatuhi pidana pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana diharapkan orang yang tidak melakukan tindak pidana menjadi takut melakukan tindak pidana².

Jenis-jenis pidana dalam hukum positif Indonesia tersebut tercantum di pasal 10 KUHP³. Jenis pidana ini dibedakan antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. pidana pokok antara lain :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan

¹ Nestapa adalah sebuah rasa gundah gulana, rasa sedih atau kegundaan. Lihat: Burhani MS, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, tt), Cet. Ke-1, hal. 450.

² Nasrullah, dkk, *pengantar Hukum Indonesia*, (Padang: 2002), Cet. Ke-2, hal. 108-109.

³ Moejljatno, KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Cet. Ke-21, hal. 5-6.

3. Pidana denda
4. pidana mati
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan antara lain:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Maka dalam tulisan ini penulis memfokuskan membahas pada salah satu jenis pidana yang terdapat dalam pidana pokok yaitu pidana mati.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), ada beberapa macam tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati antara lain:

1. Kejahataan terhadap negara (pasal 104. 111 ayat (2), 124 ayat(3), 140 ayat (3) KUHP
2. Pembunuhan dengan berencana (pasal 340) KUHP
3. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam pasal 369 ayat (4) dan pasal 368 ayat (2) KUHP
4. Pembajakan di laut, di pantai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 444 KUHP⁴.

Sedangkan jika kita berbicara tentang tata cara pelaksanaan, maka hal itu telah diatur dalam pasal 11 KUHP yang berbunyi:

⁴ Djoko Prakoso, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Cet. Ke-2 hal. 27.

"pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatukan papan tempat terpinan berdiri".⁵

Melalui penetapan presiden No. 2 tahun 1964 pasal 1 pelaksanaan penjatuhan pidana mati di Indonesia tidak lagi dilaksanakan dengan cara digantung, karena dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, untuk selanjutnya pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati, yang berlaku sampai hari ini.

Pelaksanaan pidana mati itu ditentukan oleh kepala kepolisian daerah (KAPOLDA) dengan membentuk suatu regu penembak. Mulai dari awal sampai selesainya tugas itu, regu penembak ini berada dibawah perintah kajati. pidana mati itu dilaksanakan tidak dimuka umum dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden⁶.

Hal diatas senada dengan kitap undang-undang hukum acara pidana (KUHP), yang tercantum dalam pasal 271 yang berbunyi:

"Dalam hal pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang".⁷

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1969 yang tertuang dalam pasal 9 juga disebutkan:

⁵ Moeljatno, *loc. cit.*,

⁶ *Legalitas Pidana Mati Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia*, ([http:// blog.360.yahoo.com/blog_FY.YCDA3egjbaepfozjglkgr?p=6](http://blog.360.yahoo.com/blog_FY.YCDA3egjbaepfozjglkgr?p=6)).

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. Ke-5, hal. 306.

"Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden".⁸

Maka berdasarkan gambaran diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dilakukan tindak dimuka umum melainkan ditempat tertutup, artinya pelaksanaan pidana mati tersebut tidak bisa disaksikan oleh khayalak ramai.

Sementara itu kalau kita lihat dalam hukum pidana Islam, pidana itu disebut dengan *uqubah* yang berarti pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.⁹

Tujuan dari *uqubah* itu sendiri dalam hukum pidana Islam adalah untuk pencegahan, maksudnya, menahan orang yang berbuat jarimah¹⁰ agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya , atau agar ia tidak terus melakukan jarimah. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.¹¹

Dalam hukum pidana Islam, hukum tersebut terbagi kepada dua (2)

⁸ Djoko Prakoso, *loc. cit.*,

⁹ Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-2 hal. 59.

¹⁰ Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam oleh hukuman had atau ta'zir. Yangyang dimaksud dengan had adalah yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah potong pecurian, dera seratus kali untuk jarimah zina, dan dera delapan pulu kali untuk jarimah qadzaf. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan untuk penetapan serta pelaksanaanya diserahkan kepada ulil ambri (penguasa) sesuai dengan bidangnya.. Lihat : Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 9-10.

¹¹ *Ibid.*, hal. 137.

bagian , antara lain :

a. Hukuman pokok (*al-ugubat al-ashliyah*)

Yaitu hukuman yang asal bagi sebuah kejahatan seperti hukuman mati bagi pembunuhan yang dilakukan secara sengaja

b. Hukuman pengganti (*al-`ugubat al- badaliyah*)

Yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti: diyat/denda bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja jika dimaafkan gishasnya oleh keluarga korban.¹²

Maka dalam pembahasan ini, penulis menguraikan tentang hukuman pokok dalam hukum pidana Islam itu hukuman mati, dan akan memfokuskan pada pelaksanaan hukuman_mati itu sendiri.

Dalam hukum pidana Islam , *jarimah* atau tindak pidana yang diancam dengan hukum mati antara lain:

1. Jarimah pembunuhan yang disengaja
2. Jarimah zina bagi laki-laki yang berstatus duda dan wanita yang berstatus janda, yaitu dengan hukuman rajam.¹³
3. Jarimah *hirabah*¹⁴, yaitu pengambil barang orang lain dengan cara anarkis, misalnya merampok, mengancam, atau menakut-nakuti orang.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), Cet. Ke-2 hal. 28.

¹³ Rajam adalah ditanam ke dalam tanah sampai leher, Kemudian kemudian dilempari batu sampai meninggal. Lihat: Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), hal. 50.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 69.

4. Jarimah *bughah*¹⁵, secara harfiah berarti meninggalkan atau melanggar. Sedangkan dalam istilah hukum Islam yang dimaksud *bughah* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah.
5. Jarimah *riddah*¹⁶ secara harfiah riddah berarti kembali. riddah dalam hal ini adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan.

Sedangkan pada tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut, dalam hukum pidana Islam dilakukan dengan potong leher, dipancung atau dirajam, dan pelaksanaannya dilaksanakan di depan orang ramai artinya pelaksanaannya bisa disaksikan oleh kayak ramai. .

Oleh karena itu penulisan tertarik untuk menelitinya dalam sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT FIQIH JINAYAH”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan judul penulis bahas, maka yang menjadi batasan masalah adalah: “Analisis Terhadap Pidana Mati Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah”.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 73.

¹⁶ *Ibid.*,

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah perubahan yang mendorong pelaksanaan pidana mati ?
2. Bagaimana analisis terhadap pidana mati dalam hukum positif ditinjau menurut fiqh jinayah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui sejarah perubahan yang mendorong perubahan pelaksanaan pidana mati
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pidana mati dalam hukum positif ditinjau menurut fiqh jinayah

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam perubahan pelaksanaan hukum pidana positif yang dilaksanakan pada saat sekarang
- b. Pada sisi praktisnya berguna untuk memberikan manfaat bagi setiap orang yang ingin mengetahui pidana mati dalam hukum positif menurut tinjauan hukum pidana Islam pada eksekusi pidana mati yang dilakukan dalam hukuman pidana positif Indonesia (yang dilaksanakan di tempat yang

tertutup) atau dalam hukum pidana Islam (yang dilaksanakan di depan umum).

- c. Melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana SI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. artinya penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan (mendiskripsikan) sebuah fenomena yang terjadi dan menganalisisnya berdasarkan data yang penulis peroleh yaitu:

a. Data primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, atau muktahir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan. Sumber primer dalam penelitian ini

adalah: perundang-undangan, KUHAP, dan buku-buku teori social tentang hukum

b. Data sekunder

Adalah bahan pustaka yang berisikan informasi yang mendukung bahan primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang pidana mati, buku hukum, dan artikel yang terkait.

c. Data tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk dan mendukung bahan primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain: kamus hukum, ensiklopedi hukum.

3. Teknik Analisis Data

Dalam mengelolah data yang telah penulis peroleh, maka penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analisis*) yaitu satu teknik analisis dalam kajian kepustakaan dengan cara menganalisis terhadap berbagai sumber informasi terhadap bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah dan sebagainya), dan bahan non cetak dan gambar¹⁷.

Adapun dalam prosedur *content analisis ini*, penulis melakukannya dalam 5 tahap:

1. Menentukan tujuan analisis

¹⁷ Prasetyo Irwan, *Penelitian Kualitatif dan Kwantitatif*, (Jakarta: DIA FISIF UI, 2006), Cet. Ke-3, h. 60.

Dalam hal ini penulis mengidentifikasi tujuan analisisnya dengan cara mendeskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang ada.

2. Mengumpul data

Penulis membaca, mengkaji, dan mencatat data-data yang diambil dari berbagai sumber yang ada

3. Mengidentifikasi bukti-bukti kontekstual

Dalam hal ini, penulis mulai mencari hubungan antara data yang ada dengan realitas yang sedang penulis teliti

4. Mereduksi data

Penulis mulai melakukan,”sortir” terhadap data yang telah penulis kumpulkan, mana yang digunakan (*exclude*)

G. Sistematika penulisan

Sebagai gambaran ringkas dari pokok pembahasan penelitian ini, bahwasanya bahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematis penulisan
- BAB II** Landasan teoritis, antara lain teori membangun image, teori imagalogi, teori publisistik
- BAB III** Pembahasan umum tentang eksekusi pidana mati, macam-macam tindak pidana yang diacam dengan pidana mati, eksekusi pidana mati dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana islam
- BAB IV** Bagaimana sejara perubahan pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana positif, dan analisis terhadap pidana mati dalam hukum positif ditinjau menurut fiqih jinayah
- BAB V** Kesimpulan dan saran

DAPTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Membangun *Image*

sebagai *public relations* (PR) yang cerdas adalah PR yang punya perencanaan yang matang dan jitu. PR itu membangun *image* positif ke masyarakat. Tentunya PR tidak boleh bohong sebab sekali bohong, PR tidak percaya lagi oleh public. Sementara itu, PR modern adalah PR yang mampu memanfaatkan media¹.

Pencitraan adalah cara untuk membangun *image* kepada publik.² Pada saat ini membangun *image* tersebut begitu hangat dibicarakan, hingga ada yang dinamakan dengan politik pencitraan. Politik pencitraan ini mutlak harus dilakukan oleh para politisi sekarang ini. Banyak cara yang dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan media, baik elektronik maupun cetak. Menurut Gabriel Almond, semua bentuk interaksi manusia melibatkan komunikasi. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah ikut mempengaruhi struktur komunikasi dalam masyarakat. Dari sini timbul yang sering disebut dengan komunikasi politik.

Para aktor publik ini terus membangun *image* yang baik kepada publik. Tentu dengan harapan agar apa yang dilakukan mendapat respon positif dari konstituennya. Tapi tidak semua. Ada yang melakukannya dengan tulus dan tanpa pamrih. Selain itu juga, tentu banyak gerakan-gerakan yang saling “menjatuhkan” antar pelaku aktor tadi.

¹ Nurudin, *Hubungan Media Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, hal. 6.

² <http://utankayu.PengertianPencitraan.blogspot.com/2007/03/pencitraan-km>.

Pada 27 Maret 2008, dunia Islam kembali dikejutkan dengan peluncuran FITNA, sebuah film pendek hasil olahan seorang anggota parlemen Belanda geert wilders. Film yang diliris di website liveleak, untuk versi Belanda dan Inggris, ini mengeksplorasi motivasi qurani untuk terorisme, universalisme Islam dan Islam di Belanda. Judulnya sendiri sengaja diambil dari bahasa Arab fitna yang digunakan untuk mendeskripsikan “ketidaksetujuan dan perpecahan diantara manusia”, atau juga “sebuah cobaan dan ujian keimanan”³

Indonesia, Negara dengan berpenduduk muslim terbanyak, melalui depkominfo telah menetapkan larangan pada beberapa web site seperti youtube, myspace, rapidshare and matacafe. menkominfo Muhammad nuh menyatakan permohonan maaf atas ketidaknyamanan banyak kalangan atas lahirnya larangan ini.

Bila dicermati lebih seksama, pesan yang ingin disampaikan oleh gertz dalam fitna adalah sebuah panggilan untuk mengguncang tirani Islam yang mulai merangkak perlahan di Belanda dan mendorong tampilnya leitkultur, yaitu tradisi kristiani, yahudi, dan humanis untuk bersikap; melawan Islam. Ini, sebenar, adalah isu politik local yang disampaikan oleh geertz dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen di Belanda. isu ini menjadi sensasional ketika dinikmati oleh berjuta muslim di belahan bumi yang lain ditambah dengan karakter dasar media yang gandrung akan sensasionalitas. Kesengajaan geertz dalam mencantumkan ayat-ayat al-Qur'an dalam “panggilannya” tersebut memperkuat model pembacaan [media] barat terhadap Islam yang cenderung mengasosiakan Islam sebagai gerakan politik dibanding gerakan moral, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Inilah inti

³ <http://jepits.republic> Fitna menuai kencamanprees.com/2008/05/08/fitna-sebuah-%E2%80%9Ccermin.

persoalannya. Bila Islam dipandang dari aspek politik saja serta merta dia dianggap sebagai antitesis yang mengancam eksistensi “system politik” yang berbeda.

Sebenarnya tidak menjadi persoalan bila media masa barat menyebar luaskan konsep politik Islam secara mondial. Hanya saja dimensi politik Islam yang diambil terlanjur didasari pada amsumsi yang keliru. Analis barat terkemuka semacam beernard lewis² dan samuel huntington³ telah menulis tentang “akar-akar kemarahan muslim” dan “benturan peradaban” jauh sebelum teroris menyerang world tradrade center dan pentagon.

Sebenarnya, pemberitaan media barat maupun Islam saat ini mengalami problem yang sama; yaitu banyaknya distorsi dan misrepresentasi. Media barat terlalu bersemangat menyebarkan visi kelompok Islam “tertentu” sebagaimana media masa Islam melakukan hal yang sama dalam melihat barat. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya, media masa barat-Islam, bukanlah representasi dari entitas yang homogen. Pada saat media Barat mencitrakan Islam dan media Islam, vise versa, keduanya membentur kultur media masing-masing yang kompleks. Kondisi ini semakin memperlancar upaya menampilkan “the other side” dari kedua belah pihak. gejala distorsi image yang keliru, seperti, memperkuat pikiran bahwa keduanya, media barat melihat Islam-media Islam melihat barat, sedang melakukan generalisasi yang berlebihan.

semacam ini sebenarnya langsung “menyentuh” masalah utama yang harus diselesaikan. Keberadaan fundamentalisme ekstrim dan meningkatnya sikap intoleran dan dogmatisme yang berlindung dibawah nama Tuhan menjadi hambatan serius bagi pengembangan dunia Islam dan peningkatan hubungan Islam-barat. Tetapi pencitraan

media, nampaknya, hanya berhenti pada kesan negative tanpa dibarengi dengan keseimbangan dalam mempersepsikan Islam sebagai agama kedamaian yang secara histories terbukti toleran, sebagai system religio cultural yang menjatuhkan seperlima penduduk bumi.

Akibat pencitraan semacam ini ketakutan dan bangsa Barat semakin menguat dari hari ke hari. Kepanikan moral mereka memenuhi “frame sensasional” laporan-laporan kejahatan yang dilakukan oleh Islam radikal mempunyai nilai berita, laporan-laporan tentang kemampuan muslim hidup bersama diantara beragama komunitas terabaikan. “ketidak akrab” jurnalis terhadap culture muslim dan “bisa” yang dialami oleh para pemilik media menjadi faktor pendorong banyaknya distorsi dan misrepresentasi dalam pencitraan Islam di media.

Media massa Islam telah menyebarkan gambaran masyarakat dan budaya barat yang mengalami proses dehumanisasi, komersial, seksis, dan penuh kekerasan. Dan sekalipun kadang kala ada benarnya bahwa politik barat memunculkan sentimen double standard namun argumentasi yang dibangun kalangan anti barat sering kali terlalu menggenaralisir persoalan.

Disatu pihak, media berhasil menyebarkan nilai-nilai pembebasan dan kesetaraan keseluruh tubuh sosial sehingga lebih banyak orang menyadari hak-haknya. Dilain pihak, media juga menyebarkan dan menawarkan nilai-nilai hedonis. Maka, tidak mengherankan harapan yang diletakkan pada media untuk menjadi pelopor budaya yang berkualitas jatuh dalam pemberitaan hal-hal yang remeh, gossip selebritas, kriminalitas. Bahkan berbagai bentuk iklan kian memacu konsumsi.⁴

⁴ <http://www.mirifica. Media Sebagai Pelopor Budayanet.artDetail.php?aid=1931/05/07/>.

Menurut Marshall McLuhan dalam bukunya *understanding media* mengatakan bahwa media itu *the extension of man* (media itu adalah peluasan manusia).⁵ Media sebetulnya punya kesempatan mempengaruhi masyarakat dengan menanamkan kebebasan dan inisiatif, tetapi media justru semakin membuat audiens tergantung dan kompulsif. Karena itu, sulit bagi media untuk membentuk pikiran kritis dan penilaian yang reflektif.

B. Teori imagologi

Sebagai sebuah terminology filosofis, istilah membangun *image* mempunyai pengertian yang sangat luas, yang mencakup aspek fisik, 'tampilan' (*appearance*), ide, gagasan atau 'konsep mental' (*mental image*) dibalik tampilan tersebut. Dalam konteks media pemberitaan seperti surat kabar "citraan" (*image*) dapat diartikan sebagai 'keseluruhan tampilan', yang mencakup tulisan, teks, gambar dan ilustrasi. Roland Barthes, seorang ahli semiotika Perancis, mengatakan di dalam *image: musik: text*, bahwa di dalam media komunikasi massa seperti surat kabar atau majalah tulisan dan gambar saling mendukung dalam menciptakan apa yang disebut 'tanda bahasa' (*linguistic sign*) dan 'tanda visual' (*visual dan iconic sign*) di dalam kedua tingkat tanda tersebut beroperasi pesan dan makna yang berlapis-lapis. Pertama, yang disebut 'makna denotasi' (*denotative meaning*), yaitu makna langsung, eksplisit atau tersurat pada teks atau gambar. Kedua, adalah 'makna konotatif' (*konnotative meaning*), yaitu makna implisit, tersirat, dan tidak langsung, khususnya makna-makna yang tercipta ketika sebuah citraan dikaitkan dengan konsep-konsep yang berasal dari ideologi dan mitos. Kata 'digarap' dalam konteks perkosaan, misalnya, pada tingkat denotasi (dan metafora) bisa 'hanya' bermakna seorang laki-laki 'menyetubuhi'

⁵ Nurudin, *op. cit.*, h. 51.

seorang perempuan. Akan tetapi, pada tingkat konotasi, ia dapat bermakna sebagai 'kekuasaan' atau 'dominasi' laki-laki terhadap perempuan di dalam masyarakat patriarki, dengan mengumpamakan perempuan sebagai benda garapan seperti sawah. Ia bisa juga menaturalisasikan mitos 'pasifitas' perempuan. ada banyak prinsip bagaimana ideology beroperasi dalam produksi makna termasuk makna dalam media. Diantara prinsip tersebut adalah apa yang disebut sebagai prinsip 'oposisi biner' (*binary opposition*), yaitu semacam prinsip polarisasi segala sesuatu (tanda, kode, makna, stereotip, identitas) yang di dalamnya terjadi proses generalisasi dan reduksionisme, sedemikian rupa sehingga segala sesuatu di kategorikan kedalam dua kelompok yang ekstrim, saling bertentangan dan kontradiktif. Prinsip oposisi biner menciptakan polarisasi, misalnya, antara konsep Barat/Timur, feminisme/maskulin, rasional/irasional, *progresi*/gtradisional, dengan mengenyampingkan kategori-kategori lainnya (*exclusion*)

C. Teori publisistik

Publisistik adalah sebuah teori tentang kegiatan komunikasi antara seseorang (komunikator) dengan orang banyak (komunikan), atau kegiatan komunikasi antara suatu lembaga penyebar berita dan pendapat melalui penggunaan media dengan komunikan heterogen dan tidak dikenal.⁶

Dari semua publisistik adalah dengan maksud diketahui oleh umum. Kalau dihubungkan dengan politik, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan secara langsung. Secara non politik untuk memperoleh dukungan secara tidak langsung untuk suatu ide.

⁶ Riyono Pratiko, *Lingkaran-Lingkaran Komunikasi*, (Bandung: Alumni, 1982), Cet. Ke-1 h. 138.

Dalam publisistik perlu diadakan sebuah identifikasi public, karena pengaruh media ditentukan oleh jaringan kelompok dan situasi komunikasi. Hal ini berarti bahwa apabila komunikasi media ingin mencapai komunikasi, ia perlu mempergunakannya, pesan akan banyak mengalami hambatan dan distorsi tatkalah melalui saluran dan sistem-sistem komunikasi mereka. Dengan demikian efektivitas pesannya dapat sangat berbeda dengan tujuan semula.

Peranan pesan yang dikomunikasikan adalah memperngaruhi bahkan mengubah:

1. penilaian individu kelompok tentang realita actual
2. usaha individu atau kelompok dalam membentuk gambaran tentang realita masa depannya.⁷

⁷ *Ibid.*, h. 142.

BAB III

TINJAU UMUM TENTANG PIDANA MATI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pandangan Pakar Hukum Atas Pidana Mati

Menurut Sudarto mengemukakan:

*“Pidana bukan hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu menjalaninya masih merasakan akibatnya berupa. “cap” oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat jahat. “cap” ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapatkan stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup”.*¹

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt”*. (Hukum pidana tanpa pemidanaan, berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut).²

Dalam membicarakan tujuan hukum pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum umumnya, yaitu menjamin agar di dalam masyarakat tercipta kedamaian dan keadilan bagi setiap orang.³

Beberapa pendapat ahli hukum pidana telah melahirkan teori-teori tentang pemidanaan, antara lain:

¹ Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Cet. Ke-1. h. 13.

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet. Ke-1 h. 125.

³ Ren G. kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), Cet. Ke-1 h. 49.

a. **Teori Absolute atau teori pembalasan**

Teori ini muncul pada akhir abad ke- 18, dianut antara lain oleh immanuel kant, hegel, herbart, stahl, leo polka dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan sudah tentu juga sarjana islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam al-Quran.⁴

Teori absolute atau teori kemutlakan sering juga disebut teori pambalasan. Menurut teori ini mereka atau anggota masyarakat yang nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum atau perintah yang dijatuhkan hukum, wajib diberi pembalasan sesuai dengan kejahatannya atau sanksi pidana yang mengikatnya dan yang berhak menjatuhkan sanksi itu adalah negara.

b. **Teori relative (*prevensi*)**

Penganut teori kedua (teori relative) adalah herbart: ia mengatakan apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana, maka akan timbullah perasaan tidak puas. Karena mempidanakan pejahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika, bahwasahnya penjahat tersebut harus dipidana seimbang dengan penderitaan yang ditanggung korban.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam teori relative:

“Bahwa dalam teori relative ini yang menjadi tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (generale preventie) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar dikemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie)”,⁶

Dalam teori relative, dasar pembedaan adalah pertahanan tata tertib pada masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan pembedaan dalam teori ini adalah

⁴ Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke-2. h. 31.

⁵ *Ibid.*, h. 32.

⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-2. h. 22.

menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum oleh masyarakat. Sifat prevensi dalam pembedaan ini terbagi kepada dua bagian, ada yang dinamakan prevensi umum dan prevensi khusus.

Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan prevensi khusus ialah mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

c. Teori gabungan

Teori gabungan lahir karena sebagian ahli hukum merasa keberatan terhadap kekurangan yang dianut oleh teori absolut ataupun teori prevensi. Teori gabungan membenarkan bahwa pemerintahlah yang berhak untuk bertindak terhadap seseorang yang telah berbuat kesalahan, sanksinya tidak hanya bersifat pembalasan melainkan juga untuk memperbaiki tabiat yang berbuat kejahatan/kesalahan.

Menurut teori gabungan (yang merupakan gabungan dari kedua teori di *absolute dan relative*), hukum sebaiknya disadarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsur yang ada. Fungsi hukum pidana dan tujuan hukuman di dalam masyarakat pada akhirnya sama dengan tujuan semua hukum yaitu: “menjaga tata tertib dalam kehidupan masyarakat supaya damai dan adil dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum.”⁷

Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Maka dapat dikatakan bahwa

⁷ Ren G. kartasapoetra, *op. cit.*, h. 51-52.

substansi dari pembedanaan itu adalah meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan *expiation*)

B. Macam Tindak Pidana Mati Menurut Hukum Positif

Jika kita lihat dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia membatasi kemungkinan dijatukannya pidana mati atas beberapa kejahatan-kejahatan yang berat. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu antara lain:⁸

a. Kejahatan terhadap keamanan Negara, pasal 104 dan pasal 124 (3)

Pasal 104 KUHP

*“Maka dengan maksud membunuh presiden, atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*⁹

Arti “membunuh” dalam pasal tersebut ialah menghilangkan nyawa, sedang merampas kemerdekaan tidak perlu dilakukan dengan mengikat diri si korban hingga tidak berdaya sama sekali atau menutupnya dalam kamar yang sempit. Unsurnya cukup dengan menculiknya, kemudian memaksanya untuk tinggal di rumah yang besar dan isatana, bungalow atau ruang lain yang cukup luas dan dapat bergerak dengan leluasa, tetapi dijaga dengan ketat sehingga kemerdekaannya terbatas.¹⁰

Pada kata-kata “*tidak cakap memerintah*”, dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, antara lain:

a. Dengan kekerasan (pukulan-pukulan)

⁸ Djoko Prakoso, *op. cit.*, h. 27.

⁹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 43.

¹⁰ Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), h. 120.

- b. Memberikan obat atau bahan-bahan minuman, makanan atau suntikan yang merusak kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga menjadi sakit lumpuh, tidak dapat berpikir dan sebagainya.

Jadi, dari uraian pasal 104 KUHP di atas, ada tiga (3) tindak pidana yang dilakukan:

1. Maksiat yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala negara
2. Maksiat yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan kepala negara dan wakil kepala negara
3. Maksiat yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan kepala negara dan wakil kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Pasal 124 ayat (3) KUHP:

“Pidana mati atau pidana penjara jika pembuat: seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan.”¹¹

Ke-1: Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya; merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau bangunan tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.

Ke-2: Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru hara, pemberontakan atau disersi di kalangan angkatan perang.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan pada “waktu perang” sengaja memberi pertolongan kepada musuh dan sengaja merugikan negara bagi keuntungan musuh.

¹¹ Moeljatno, *op. cit.*, h. 50.

Maksud “waktu perang” yang dijelaskan dalam pasal tersebut di atas telah dijelaskan dalam pasal 96 ayat (3):

*“Yang disebut masa perang termasuk juga selama perang sedang mengancam. Begitu juga dikatakan masih ada masa perang segera sesudah telah diperintahkan mobilisasi angkatan perang dan selama mobilisasi berlaku”.*¹²

Sedangkan dalam UUD 1945 pasal 11 dinyatakan, bahwa perang tersebut adalah perang dinyatakan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat dan menurut pasal 12 UUD 1945, Presiden dapat menyatakan wilayah republik Indonesia atau daerah-daerah bagiannya dalam keadaan bahaya.

b. Pembunuhan dengan berencana (pasal 340) KUHP

*“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*¹³

Isi pasal ini sama saja dengan isi pasal 338 yang berbunyi: *“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*, hanya bedahnya, kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud dengan pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang dalam pasal 340 ini pelaksanaan

¹² Sugandhi, *op. cit.*, h. 112.

¹³ Moeljatno, *op. cit.*, h. 123.

pembunuhan itu ditanggukan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.¹⁴

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih sedemikian renggang, sehingga sipelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuh itu diteruskan atau dibatalkan, atau merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

c. Pencurian yang menyebabkan kematian (pasal 365 ayat (4) KUHP

Pasal 365:¹⁵

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 pasal 365 ayat (2).

Pasal 365

Nomor 1: *jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*

3: *jika maksudnya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu*

d. Pembajakan di laut, di pantai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 444 KUHP.

“Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, palingma atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melaksanakan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”¹⁶

¹⁴ Sugandhi, *op. cit.*, h, 230.

¹⁵ Moeljatno, *op. cit.*, h. 130.

¹⁶ Moeljatno, *op. cit.*, h.. 158.

Pembajakan adalah sebuah proses perampokan yang beraksi terhadap perahu-perahu yang melalui atau melewati lautan.¹⁷

Lautan bebas adalah lautan luar batas territorial dari negara yang menguasai daratan itu. Adapun batas laut territorial Indonesia berubah-ubah. mula-mula 3 mil Inggris, diukur pada waktu air laut sedang surut (1 mil Inggris = 1858, 50 meter). Kemudian dengan undang-undang No. 4 tahun 1960, ukuran laut territorial itu ditetapkan menjadi 12 mil dan terakhir berubah lagi menjadi 200 mil.

- e. Sebelum kita membahas tentang terorisme menurut pandangan agama Islam, terlebih dahulu marilah kita pahami tentang pengertian terorisme. menurut kamus besar bahasa Indonesia, artinya :

Terorisme : Adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik).

Teroris : Adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut (biasanya untuk tujuan politik).

Teror : Adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis, dalam usaha menciptakan ketakutan, kengerian oleh seseorang atau golongan.

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggunakan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil dari pada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal

¹⁷ J.S.Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), Cet. Ke-1. h. 111.

dari Prancis pada abad 18. kata terorisme yang artinya dalam keadaan teror (under the terror), berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang berarti gemetar dan “*detererre*” yang berarti takut¹⁸.

Dalam revisi UU No. 15 tahun 2003 ada pencantuman beberapa tindak pidana dimana beberapa pasal bukan hanya dirumuskan terlalu luas, tetapi berpotensi melanggar HAM. terorisme seperti pada pasal 9A, berbunyi¹⁹:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan utama yang berpotensi untuk digunakan sebagai bahan peledak
- b) Apabila bahan-bahan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme, pelaku pidana paling lama 15 tahun.
- f. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.

Undang-undang republic Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

¹⁸ “history and of terrorism” http://wikipedia.org/wiki/detinitions_of_terorisme. Diakses tanggal 22 maret 2010

¹⁹ Kompas Cyber Media, “Revisi UU Anti Terroisme Diakui untuk menanam Kewenangan Inteleje sabtu,30 Agustus 2003 _www.Kompas.com, diakses tanggal 22 maret 2010

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitokan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika

C. Macam Tindak Pidana Mati Menurut Hukum Islam

Pada tatar pidana Islam, maka akan ditemukan beberapa jarimah yang bisa dilakukan hukuman mati jika jarimah tersebut dilakukan, antara lain:

a. Jarimah pembunuhan yang disengaja (*qatlul'amdi*)

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (قتل العمد), yaitu pembunuhan yang padanya terdapat unsur kesengajaan dalam berbuat, maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan seseorang akibat yang diharapkannya memang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, ketika A memukul si B dengan kayu, ketika itu akibat yang diharapkan oleh A adalah memang untuk menghilangkan nyawa si B. ,

Kemudian pembunuhan itu adalah unsur kesengajaan dalam sasaran, maksudnya adalah, bahwa dalam melakukan pembunuhan, seseorang tersebut telah menentukan secara pasti orang yang akan dibunuhnya. Contohnya, bahwa

si A telah menentukan bahwa si B merupakan orang yang akan dibunuhnya bukan si C,

Dalam pembunuhan sengaja juga ada unsur kesengajaan dalam alat yang digunakan, maksudnya adalah bahwa dalam memilih alat untuk melakukan perbuatannya, seseorang memang telah memilih alat yang bisa menghilangkan nyawa orang lain, seperti sengaja membunuh orang tertentu dengan menggunakan senjata api sampai mati.²⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja adalah alat yang biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebagai alat pembunuhan, yaitu alat yang dapat digunakan untuk melukai atau memukul atau memukul sehingga menyebabkan luka, misalnya tombak, pedang atau sebagainya.²¹

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengisyaratkan alatnya yaitu alat yang biasa digunakan untuk membunuh, sekalipun tidak melukai. Alat yang digunakan untuk membunuh ada 3 macam:²²

1. Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang, tombak dan sebagainya.
2. Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk, tongkat.
3. Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabi'atnya seperti menggunakan tangan kosong.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Basar Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2001), Cet. Ke-2.

²¹ A. djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), Cet. Ke-3 h. 129.

²² *Ibid.*,

Dari sisi ini, jika alat yang digunakan alat dari jenis pertama, maka pembunuhannya dikategori sebagai pembunuhan sengaja, apabila alat yang digunakan merupakan jenis kedua, maka pmbunuhannya dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. Akhirnya, jika alat yang digunakan berupa alat dari jenis ketiga, maka pembunuhannya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan kesalahan.²³

Mengenai ancaman hukuman terhadap pembunuhan sengaja ada dua bentuk hukuman:²⁴

a. Hukuman pokok

Hukuman pokok terhadap pembunuhan sengaja adalah *qisas* atau balasan setimpal. Karena pembunuhan ini mengakibatkan kematian, maka balasan yang setimpal adalah kematian, atau hukuman mati dengan cara yang dilakukan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang mardeka dengan orang mardeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita”.²⁵

²³ *Ibid.*, h. 129.

²⁴ *Ibid.*, h. 263.

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemanya*, (Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemah/dan tafsiran al-qur'an, 1971), Cet. Ke-1 h. 43.

b. Hukum pengganti

Hukuman pengganti dilaksanakan bila hukuman pokok yaitu *qisas* tidak dapat dilaksanakan, baik tidak terpenuhi syarat pelaksanaan *qisas* atau pelaksanaan *qisas* gugur karena telah mendapatkan maaf dari kerabat yang terbunuh. Hukuman pengganti dalam hal ini adalah diyat yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat yang terbunuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 178:

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afah dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberima’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka banginya siksa yang sangat pedih”.

Kata ‘*ufiya* dalam Tafsir Ali As Sais dijelaskan bahwa kata ‘*ufiya* mempunyai dua buah makna, antara lain bermakna العطاء yaitu memberikan maaf dengan menyerahkan sejumlah harta sebagai ganti pelaku pembunuhan kepada ahli korban, *ufiya* juga makna الأسقط yaitu memberi maaf kepada pelaku pembunuhan tanpa ada syarat apapun (tidak membanyar harta kepada ahli korban.

b. Jarimah zina bagi laki-laki yang berstatus duda dan wanita yang bersatatus janda (*muhsan*)

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah: hubungan kelamin antara laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fugaha, (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.²⁶

Perzina tersebut dilarang secara tegas dan keras oleh Islam. ketegasan tentang perzinahan ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “*dan jangan kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*”.²⁷

Dalam ayat ini dapat kita lihat bahwa pada kata-kata لا تقربوا terdapat huruf لا yang memfaedahkan nahi artinya yang memfaedahkan larangan, maka dalam ayat tersebut terlihat sebuah pelarangan dalam melakukan perzinahan, ditambah lagi di penghujung ayat ada kata-kata فاحشة وساء سبيلا yang berarti, bahwa perbuatan zina itu sangat keji dan merupakan jalan yang sangat buruk lagi tercela

²⁶ Zainuddin Ali, Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-2. h. 37.

²⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 429.

dan mengambil dengan cara menggagahi pemiliknya disuatu tempat secara terang-terangan.

Para ulama sepakat bahwa syarat seseorang dapat disebut *muharib* adalah membawa senjata, baik berupa batu, kayu, maupun besi atau apa saja yang dapat disebut senjata dan dapat dipergunakan untuk berkelahi, kalau tidak bersenjata berarti dia bukan *muharib*

Adapun yang menjadi dasar hukuman nirabah ini adalah firman Allah SWT dalam surat al-Maidah Ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan bagi mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.³¹

Atas dasar ini para ulama mensyaratkan pada seorang perampok harus punya kekuatan fisik untuk memaksa, bahwa imam hanifah dan imam ahmat mensyaratkan seorang perampok harus membawa senjata tajam, sedangkan menurut imam Syafi'i yang penting seorang perampok harus mempunyai kekuatan fisik untuk memaksa, apabila perampok terdiri dari segelombolan

³¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 164 .

manusia, maka seluruh dianggap sebagai perampok selama masing-masing melaksanakan perbuatan langsung.

Sanksi bagi perampok Menurut Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda dengan perbuatannya. Bila hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya membunuh dan tidak mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.

Menurut Imam Malik, sanksi hirabah ini diserahkan pada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh, maka hukumannya Menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Zaidiyah adakah hukuman mati lalu disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ulil ambri dapat memilih apakah potong tangan dan kakinya dulu, baru di hukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa di potong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja.

d. Jarimah pemberontakan (*al-Baghyu*)

Menurut bahasa *al baghyu* adalah memilih (طلب الشيء) yaitu mencari atau menuntut sesuatu.³²

Selain itu, kata la Baghyu menurut 'uruf adalah minta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak.

³² Ahmad Wardhi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-2. h. 109.

Tiada kesepakatan di kalangan ulama tentang defenisi al baghyu, ulama Hanifah, mengartikan sebagai sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.

Ulama Syafi'iyah: “pemberontak adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memilih kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin.³³

Fakto penyebab perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat dan bukan perbedaan dalam unsur yang prinsip

Keharaman pemerontakan (*al baghyu*) telah ditegaskan dalam al-Quran surat al-Hujarat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah . kalau dia telah surut, damaikanlah diantara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah

³³ A. djazul, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), Cet. Ke-2 h. 106.

hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.³⁴

Kemudian dalam surat an-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil ambri antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”³⁵.

Pembalasan tentang pemerontakan ini berkaitan dengan masalah *ulil ambri* yaitu orang atau kekuasaan yang mengurus kepentingan umat Islam, baik yang berkenaan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat, baik menggunakan nama imam, khalifah atau nama lainnya.

Kepatuhan kepada ulil ambri tersebut selalu dituntut selama ulil ambri itu tidak membawa umat kepada hal-hal yang menyalahi hukum Allah, dalam arti bila ulil ambri itu sudah zhalim dan menyuruh umat berbuat mungkar dan menyalahi perintah Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mematuhi. Umat Islam yang tidak mematuhi perintah ulil ambri yang sah dan adil berarti telah menyalahi perintah Allah yang terkandung dalam ayat diatas, oleh karena itu mereka disebut durhaka dan pantas menerima celaan dari Allah bila kedurhakaan itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan kekuasaan

³⁴ Depertemen Agama RI, *op. cit.*, h. 846.

³⁵ *Ibid.*, h. 128.

bersenjata yang terorganisir dengan pimpinan yang dipatuhi, perbuatan tersebut sudah termasuk dalam kategori pemberontakan.³⁶

Sedangkan juga dalam hadist nabi juga dikatakan:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا
السلح فليس من (متفق عليه)

Artinya: “dari Ibnu Umar r.a Beliau berkata: Rasulullah SWA bersabda,
“barang siapa yang mengangkat senjata menyerang kami, maka dia
bukan dari golongan kami (muttaafaq ‘alaih)”.³⁷

Maksudnya ialah, orang yang mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang muslim bukan dengan alasan benar, dikiaskan peperangan dengan membawahkan senjata (mengangkat senjata) itu, karena pembunuhan lazim membawahkan pedang (senjata).

Adapun yang menjadi unsur-unsur pemberontakan (*al-baghyu*) tersebut adalah:³⁸

1. Keluar dari imam dengan terang-terangan

yang dimaksud keluar dari Imam adalah menentang dan mencoba untuk menjatuhkan Imam atau menolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya. Disepakati para ulama bahwa bisa bahkan wajib tidak taat kepada Imam bila ia memerintah hal-hal yang maksiat.

³⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 313.

³⁷ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet. Ke-1 h. 923.

³⁸ A. Djazul, *op. cit.*, h. 107.

Yang dimaksud Imam yang sah di sini adalah pemimpin/penguasa yang diterima oleh mayoritas umat, melalui bai'at atau pengangkatan yang dilakukan secara resmi dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan syara'.³⁹

Juga disepakati di kalangan mazhab empat bahwa penyerangan terhadap para pemberontak itu harus didahului dengan menghubungi dan menanyakan pada mereka alasan yang menyebabkan mereka keluar ketaatan kepada imam dan imam harus lebih dahulu mengajak mereka kepada ketaatan. Inilah yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَتَبَايَعَا لَآلِئِهِ تَبَايَعَا حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

Ar:tinya: “Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan di antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah”.⁴⁰

2. Ada i'tikad yang tidak baik
3. Dilakukan oleh sekelompok orang yang telah terorganisir dengan baik oleh seseorang pimpinan mereka sangat patuhi.
4. Dilakukan dengan suatu argument yang jelas, terlepas apakah argument itu benar atau salah. Maka jika perlawanan terhadap penguasa yang sah

³⁹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 341.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 846.

dilakukan dengan tanpa menggunakan sebuah argument atau tujuan, maka itu bukan dinamakan pemberontakan.

Perlawanan terhadap kekuasaan yang sah tersebut dilakukan dengan sengaja, sadar dan mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah salah dan dilarang oleh agama, maka jika dilakukan dengan tidak sengaja dan tidak mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah suatu kejahatan, maka hal tersebut tidak di namakan dengan pemberontakan.

e. Jarimah Murtad (Riddah)

Riddah secara harfiah berarti kembali. riddah dalam Islam adalah kembali seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan. Dari pengertian tersebut anak-anak yang menyatakan memilih agama selain agama Islam tidak termasuk murtad, begipulah orang gila. Orang yang terpaksa harus meninggalkan agama Islam lantaran diancam dengan ancaman yang membahayakan dirinya atau keluarganya juga tidak dapat dipandang murtad.

Seseorang baru bisa dikatakan murtad adalah ketika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁴¹

1) Keluar dari Islam

Yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebut oleh para ulama ada 3 macam:

a. Murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan

Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram, atau

⁴¹ A. Djazul, *op. cit.*, h. 114.

meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya dengan perbuatan yang tidak wajib, dan dilakukan dengan sengaja, misalnya sujud kepada matahari atau bulan, dan berzina dengan menganggapnya bukan suatu perbuatan yang haram.

b. Murtad dengan ucapan

Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang

c. Murtad dengan I'tikad

Murtad dengan i'tikad adalah i'tikad yang tidak sesuai dengan i'tikad (akidah) Islam, seperti beri' i'tikad Allah itu sama dengan makhluk, beri'tikad bahwa alam ini kekal, tetapi pada tahap ini, orang tersebut belum bisa dikatakan kafir sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan.⁴²

2) Adanya I'tikad tidak baik

Bahwasahnya ada dalam hatinya sebuah i'tikad bahwa Allah itu sama dengan makhluk yang ada di dunia dan menganggap bahwasahnya dunia ini adalah langgeng atau abadi.

Adapun ancaman hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati, sebagai sabda Rasulullah SAW:

عن زدين اسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير دينه فاضربوا عنقه

⁴² A. Djazul, *op. cit.*, h. 115.

Artinya: *“Dan Zaid bin aslam dari nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengganti agamanya (murtad), maka pancunglah lehernya oleh kalian”*.⁴³

Sedangkan dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat al-Taubah ayat 12:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *“Jika mereka merusak sumpa (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti”*⁴⁴.

D. Eksekusi Menurut Hukum Positif

Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum pidana positif Indonesia sebenarnya telah diatur dalam pasal 11 KHUP yang berbunyi:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatukan papan tempat terpidana berdiri”.

Pada tahun 1964 dengan penetapan presiden (Penpres) No. 2 tahun 1964 tanggal 27 April 1964 dikeluarkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer.

Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa pada pelaksanaan pidana mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak mati.

⁴³ Muhammad Abid As-Sindi, *op. cit.*, h. 1164.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 279.

Adapun yang menjadi sebab digantinya hukuman mati secara digantung dengan ditembak mati adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Bahwa sulit untuk menemukan orang algojo untuk melaksanakan hukuman mati tersebut, walaupun ada tidak akan bertahan terhadap tekanan-tekanan batin baik didalam dirinya sendiri maupun hinaan dari orang lain
2. Bahwa kemungkinan seseorang yang digantung lama baru mengalami kematian sehingga merupakan siksaan yang diluar prikemanusiaan
3. Menjatuhkan hukuman mati dengan cara menggantung terpidana sangat mempengaruhi jiwa orang yang melihatnya untuk melakukan kejahatan

Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut dikelaskan pada pasal 10 sampai dengan pasal 14 undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer:

Dalam Pasal 10 mengatakan sebagai berikut:

- 1) Untuk pelaksanaan pidana mati kepala polisi komisariat daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah regi penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang tantama, dibawah pimpinan seorang perwira, semua dari brigade mobil
- 2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, regi penembak tidak mempergunakan senjata organiknya
- 3) Regu penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi/ Jaksa tersebut dalam pasal 4 sampai pelaksanaan pidana mati

⁴⁵ Andi Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet. Ke-1 h. 93.

Dalam Pasal 11 mengatakan sebagai berikut:

- 1) Terpidana dibawah ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup
- 2) Jika diminta terpidana dapat disertai oleh perawat rohani
- 3) Terpidana berpakaian sederhana mungkin
- 4) Setibahnya ditempat pidana mati, komando pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendaknya

Dalam Pasal 12 mengatakan sebagai berikut:

- 1) Terpidan dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut
- 2) Jika dipandang perlu, jaksa tinggi/ jaksa tersebut dalam pasal 4 dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu

Dalam Pasal 13 mengatakan sebagai berikut:

- 1) Setelah terpidana siap ditembak dimana dia menjalani pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ketempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi/ jaksa tersebut dalam pasal 4
- 2) Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter

Dalam Pasal 14 mengatakan sebagai berikut:

- 1) Apabilah semua persiapan telah selesai, maka jaksa tinggi/ jaksa tersebut dalam pasal 4 memerintakan untuk memulai pelaksanaan pidana mati
- 2) Dengan segera para pengiring terpidana menjaukan diri dari terpidana

- 3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, komandan regu penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya kebawah secara cepat, dia mamberikan perintah untuk menembak
- 4) apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada bintanga regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya

E. Eksekusi Menurut Hukum Islam

Sedangkan jika dilihat dalam tataran hukum pidana islam, pembahasan tentang pidana mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (*al-jinayah*) sama halnya dengan pencurian (*as-sirqah*), minuman keras (*al-khamar*), zina (*al-zina*), hukum balas/ timbal balik (*al-qisaa*), pemberontakan (*al-baghyu*), murtad (*riddah*) dan perampokan (*al-hirabah*).

Hukuman mati merupakan hukuman puncak, terpidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan sengaja, perampok, murtad, pemberontakan. zina bagi yang muhsan.

Jika dilihat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati dalam hukum pidana Islam, pelaksanaanya dilakukan didepan orang ramai atau ditempat yang terbuka dan bisa disaksikan oleh khalayak ramai.

Jika kita lihat apakah ada indikasi pelaksanaan hukuman mati dalam Islam dilaksanakan didepan orang ramai maka penulis akan membahas satu persatu

Pertama pelaksanaan hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan segaja.

Dalam sebuah hadist dikatakan, malik telah menceritakan kepada kami dari Yahya Ibnu Sa'id, dari Sa'id bibnul Musayyad:

ان رجلا با الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله او قتلها فكتب معاوية الى ابي موسى الإشعري يسأل له عن ذلك عليا رضي الله عنه فسأل له فقال علي رضي الله عنه: ان هذا الشيء ماهو بارضى العراق عزمتم عليك لتخبرني فاخبره. فقال علي رضي الله عنه : انا ابو الحسن ان لم يأت باربعة شهداء فليعط برمته.

Artinya: “Seorang lelaki di negeri sham menjumpai isterinya bersama laki-laki lain, lalu ia membunuh lelaki itu atau isterinya. Maka muawiyah menulis surat kepada Abu Musa al-Asya'ri untuk menanyakan masalah tersebut kepada Ali k.w. Abu Musa bertanya kepada Ali k.w., maka Ali k. a. menjawab, “sesungguhnya hal ini tidak terdapat di negeri irak, aku merasa yakin terhadap dirimu bahwa kamu pasti akan menanyakannya kepadaku dan aku akan menjawabnya, “kemudian Ali.k.w berkata, “aku adalah Abu Hasan. Jika lelaki itu tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka hendaklah ia di qisahah dalam keadaan terikat”.⁴⁶

Falyu'aththa birummatihi, ar-rummah adalah seutas tali yang dipakai untuk mengikat tawanan atau pembunuhan jika digiring untuk mejalankan hukum qishas. Makna yang dimaksud ialah menyerakan si pembunuh untuk diqishas dan si pembunuh tidak melarikan diri.⁴⁷

Maka berdasarkan hadist di atas dan berdasarkan penjelasannya, penulis menjadikan bahwa perkataan “menyerahkan si pembunuh kepada mereka agar

⁴⁶ Syeikh Muhammad Abid As-Sindi, Musnad Syafi'I, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), Cet. Ke-2 h. 1123

⁴⁷ Ibid., h. 1148.

mereka dapat mengqishasnya” merupakan sebuah indikasi bahwa pelaksanaan qishas itu dilaksanakan di depan orang ramai.

Hal itu sesuai dengan hukuman mati yang dilaksakan di Arab Saudi, sebuah negara yang bersumberkan kepada hukum Islam. Pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan di salah satu mesjid yang ternama di jeddah yaitu mesjid qisas. Mesjid ini merupakan salah satu tempat terlaksananya hukuman mati menurut hukum pidana Islam yaitu dengan cara dipenggal (potong leher) dan pelaksanaannya bisanya dilaksanakan pada hari jum’at sesudah menunaikan shalat jum’at dan disaksikan oleh kahalayak ramai.

Pada waktu pelaksanaan hukuman mati tersebut, orang-orang yang melihatnya tidak boleh mengabadikan dengan kamera. Rambut bertuliskan “*no photography*” terpasang di beberapa tempat di sekitar tempat pelaksanaan eksekusi tersebut. Barang siapa yang ingin mengambil gambar tentang pelaksanaan eksekusi tersebut, maka harus siap dengan resiko yaitu potong lengan dan tangan jika diketahui oleh “askar” (Polisi Arab Saudi)

Kedua kita lihat dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap orang muhsan (orang yang telah kawin).

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد فناداه فقال يا رسول الله انى زنيت فاعرض عنه فتنحى وجهه فقال له يا رسول الله انى زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا قال فهل احصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه.

Artinya: “*Diriwayatkan dari Abu Huarairah r.a katanya seorang laki-laki dari kalangan orang Islam datang kepada rasulullah SAW. Ketika baginda sedang berada di mesjid. Laki-laki itu memanggil baginda SAW. Wahai rasulullah! Sesungguhnya aku telah melakukan zina, Rasulallah SAW berpaling darinya dan menghadapkan wajahnya kearah lain. Lelaki itu berkata lagi kepada rasulullah, wahai rasulullah! Sesungguhnya aku telah melakukan zina, sekali lagi rasulallah berpaling darinya. Perkara itu berlaku sebanyak empat kali. Akhirnya rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda: adakah kamu gila? Lelaki itu menjawab: tidak, rasulullah bertanya lagi: apakah kamu sudah menikah atau berumah tangga? Lelaki itu menjawab: ya, maka rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya: bahwalah dia pergi dan melaksanakan hukuman rajam atas dirinya*”.⁴⁸

Dari hadist di atas bisa dipahami bahwa hukuman bagi pezina yang sudah perna kawin (muhsan) adalah hukuman mati dengan cara dirajam (dilempar dengan batu sampai mati), dan pelaksanaan hukum rajam itu dilakukan di depan orang ramai di ketahui dari penggalan surat an-Nur ayat 2:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*”.⁴⁹

Ketiga murtad (keluar dari agama Islam), pelaksanaan hukuman matinya adalah sebagai mana yang diceritakan oleh Ibnu Ayaynah telah menceritakan pada kami, dari Ayyub Ibnu Tamimah, dari Ikrimah yang mengatakan:

لما بلغ ابن عباس رضي الله عنهما ان عليا رضي الله عنه حرق المرتدين او الزنادقة قال : لو كنت انا لم احرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه, ولم احرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا ينبغي لا حد ان يعذب بعذب الله.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 41-42.

⁴⁹ Depertemen Agama RI, *op. cit.*, h. 543.

Artinya: “Ketika sampai berita kepada Ibnu Abbas r.a bahwa Khalifah Ali Karamallahu Wajhahu, membakar orang-orang murtad atau orang-orang kafir zindiq, ia berkata, “seandainya aku, niscaya aku tidak akan membakar mereka. Tetapi aku benar-benar akan membunuh mereka, karena sabda Rasulullah SAW mengatakan, “barangsiapa yang berganti agama, maka bunuhlah dia oleh kalian. Aku tidak akan membakar mereka karena sabda Rasulullah SAW, “Tidak layak bagi seseorang melakukan hukuman dengan hukuman Allah”.⁵⁰

Yang dimaksudkan dengan hukuman Allah di atas adalah memakai api, hanya Allah sajalah yang menghukum dengan api, yaitu api neraka.

Selanjutnya Malik menceritakan, dari Abdur Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Avdul Qari’, dari ayahnya yang menceritakan:

قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبال ابوموس فساءله عن الناس فاخبره
ثم قال له: هل كان فيكم من مغربة خير؟ فقال: نعم رجل كفر بعد اسلامه. قال فما فعلتموه؟
قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا واطعتموه رغيفا
واستبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله، اللهم اني لم احضره ولم امر ولم ارض اذ بلغني.

Artinya: “Seorang lelaki utusan Abu Musa datang kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab r.a lalu Umar bertanya kepadanya mengenai keadaan orang-orang maka lelaki itu menceritakan semuanya kepada Umar, kemudian Umar bertanya:” apakah ada berita baru dari kalian?” lelaki itu menjawab, “ta, ada seorang lelaki kafir sesudah Islam, “Umar bertanya, “kami ajukan di ke pengadilan, lalu kami pancung lehernya maka Khalifah Umar r.a berkata,” mengapa kalian tidak kalian penjarakan dia selama tiga hari, lalu kalian beri dia makan raghif (roti kering) dan kalian suruh dia untuk bertobat, barang kali dia mau bertobat dan kembali kepada perintah Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menghadirinya serta tidak memerintakannya, dan aku tidak rela ketika berita ini sampai kepadaku”.⁵¹

⁵⁰ Syeikh Muhammad Abid As-Sindi, Musnad Syafi’I, *op. cit.*, h. 1164

⁵¹ *Ibid.*, h. 1134

Bila terjadi tindakan murtad dari seorang muslim dan telah terbukti secara menyakinkan serta telah terpenuhi segala rukun dan syaratnya, maka tindakan yang harus dilakukan oleh penguasa adalah sebagai berikut:

Pertama Menyuruh orang murtad untuk bertaubat. Untuk maksud ini diberi tenggang waktu selama tiga hari. Taubat yang orang murtad dapat diketahui melalui cara-cara berikut:

- a. Dengan ucapan, baik dalam bentuk ungkapan resmi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat atau dengan mengatakan bahwa ia kembali kepada Islam
- b. Dengan tindakan yaitu melakukan kembali semua surat Allah yang selama ini telah ditinggalkan kembali larangan Allah yang selama ini telah pernah dilakukannya selama murtadnya dan tidak lagi akan melakukan perbuatan yang tercela
- c. Menyesali tindakan murtad yang pernah dilakukannya dan bejanji untuk tidak mengulangi kembali tindak murtad tersebut

Kedua Bila dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan yang melakukan tindakan murtad ternyata tidak mau bertaubat setelah diperintakan untuk bertaubat, maka dilaksanakanlah hukuman mati dengan cara sebagaimana yang berlaku pada hukuman mati dalam pelaksanaan *hudud* yaitu secara terbuka

di depan orang banyak. Karena kejahatan murtad ini termasuk kejahatan yang diancam dengan hukuman *hudud*⁵²

Keempat pelaksanaan pidana mati pemberontakan (*al-Baghyu*) pelaksanaan eksekusi pidana mati pada jarimah pemberontakan seperti merusak jembatan, membom gudang amunisi, gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, semua itu tidak dihukum dengan hukuman haribah biasa, melainkan dengan hukuman untuk jarimah pemberontakan yaitu human mati. Apabila tidak ada pengampunan (*amnesty*).⁵³

Pelaksanaan hukuman matinya adalah dengan melakukan penumpasan yang dilakukan dengan bertujuan untuk menghentikan perberontakannya dan melumpuhkannya

Ini merupakan bahwasahnya pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku pemberontakan adalah diperangi bersama-sama, artinya dilakukan pada khalayak ramai untuk penumpasan.

Kelima Pelaksanaan pidana mati tindak pidana pemberontakan (*hirabah*) dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku pemberontakan ini ada 4 macam antara lain:

1. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku pemberontakan yang hanya menakut-nakuti adalah pengasingan (*an-nafyu*). Pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasannya adalah firman Allah SAW dalam surat al-Maidah ayat 33:

⁵² Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 319-320.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-2 h. 117.

..... يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”⁵⁴

Adapun menurut Imam Syafi’I dan Syi’ah Zaidiyah, hukumannya adalah ta’zir atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama.

2. Pelaksanaan hukuman untuk pelaku pemberontakan yang mengambil harta tanpa membunuh. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, syi’ah zaidiyah, hukumannya adalah potong tangan dan kaki dengan bersilang, dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT dalam surat al Maidah ayat 33:

أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أ

Artinya: “Atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik”.⁵⁵

3. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku perampokan dengan membunuh tapi tidak mengambil harta, Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, dan riwayat dari Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman dan tanpa disalib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syi’ah Zaidiyah di samping hukuman mati, pelaku juga harus disalib
4. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku perampokan yang membunuh dan mengambil harta, menurut Imam Syafi’I, Imam Ahmad, Syi’ah Zaidiyah, Imam Yusuf, dan

⁵⁴ Depertemen Agama RI, *op. cit.*, h. 164.

⁵⁵ *Ibid.*,

imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukuman adalah dibunuh (hukuman mati), disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari 3 alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki dan ketiga, disalib kemudian dibunuh

Maka pada pelaksanaan hudud ini semua dilaksanakan di depan orang ramai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya garis-garis besar fiqih, bahwa dalam pelaksanaan setiap hudud, eksekusinya dilaksanakan di depan khalayak ramai.⁵⁶

Walaupun secara keseluruhan dalil-dalil yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana Islam dilaksanakan di depan orang ramai tidak dijelaskan secara terperinci di dalam al-Quran selain pelaksanaan dera bagi pelaku zina yang tidak muhsan dalam surat an Nur ayat 2, maka penulis mengqiyaskannya kepada surat an-Nur ayat 2 tersebut pada bait terakhir tersebut yang berbunyi:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"*⁵⁷

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 320.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 543.

Qisas adalah membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya tersebut, baik hukum maupun sifat.⁵⁸

Para ulama usul fiqih menetapkan bahwa rukun qiyas itu ada 4 buah, yaitu:

1. Al-Ash

Adalah wadah atau obyek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat al-Quran dan Hadist dan ijma'. Pada penulis ini, hukum ashalnya adalah ayat yang menjelaskan tentang pelaksanaan Rajam terhadap pelaku zina muhsan, yaitu pada surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan dari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁵⁹.

Ayat ini menjelaskan bahwa terhadap pelaku jarimah zina tersebut di laksanakan hukuman hudud di depan orang ramai

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: PT. Logos, 1997), Cet. Ke-1 h. 64.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 543.

2. *Furu' / Far'un*

Adalah obyek yang akan ditentukan hukumanya, karena tidak ada nash atau ijma' yang menjelaskan. Dalam penulisan ini yang menjadi *furu'* nya adalah pelaksanaan hukuman mati yang dijatukan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*qatlul 'amdi*, riddah (*murtad*), pezina muhshan (yang pernah kawin), pemberontak (*al-baghyu*), perampok (*hirabah*)

3. *'Illat (motivasi hukum)*

Adalah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada *ashal*. Maka pada penulisan ini yang terjadi *'illat* hukuman adalah, bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*qatlul 'amdi*, riddah (*murtad*), pezina muhshan (yang pernah kawin), pemberontakan (*al-baghyu*), perampok (*hirabah*) adalah tindak-tindak pidana yang dihukum dengan hukuman mati dan tindak pidana tersebut diatas merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman hudud dan dalam hukuman pidana Islam, pelaksanaannya hukuman hudud itu dilakukan di depan orang ramai.

4. *Hukum al-Ashl*

Adalah hukum syara' yang ditentukan oleh nash atau ijma' yang akan dilakukan pada *furu'*. Pada penulisan ini, menurut penulisan hukum *ashalnya* adalah surat an-Nur ayat 2 tentang pelaksanaan rajam:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinnya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan dari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁶⁰

Ayat diatas diberlakukan pada furu’ (pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (*qatlul ‘amdi*, riddah (*murtad*), pezina muhsan (yang pernah kawin), pemberontakan (*al-baghyu*), perampok (*hirabah*) karena jarimah tersebut merupakan jarimah yang dikenakan hukuman hudud. Sedangkan hukuman dera bagi pezina yang tidak muhsan yang dijelaskan dalam surat an Nur ayat 2 (*al-ashl*) tersebut juga merupakan hukuman hudud

⁶⁰ *Ibid.*, h. 543.

BAB 1V

PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Sejarah Perubahan Yang Mendorong Perubahan Pelaksanaan Pidana Mati

Perjalanan sejarah menunjukkan adanya berbagai macam cara pelaksanaan pidana mati. Sebelum perang dunia kedua pelaksanaan pidana mati kebanyakan dijalankan dengan digantung pada tempat-tempat di tengah kota (a lun-alun) dan perlihatkan di muka umum dengan maksud agar sebanyak mungkin orang dapat menyaksikan dan menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Tiang gantungan menjadi pemandangan biasa dipintu gerbang (jalan masuk) kota besar Negara-negara jajahan pada saat itu, termaksud Indonesia.¹

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dari waktu ke waktu. Sejarah pidana mati tidak bisa dipisahkan dengan sejarah KUHP itu sendiri. Berdasarkan azas koonkordasi bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia adalah *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* (WVSNI) yang diberlakukan di negeri Belanda sejak 1915. sejak saat itu hingga masa penduduk Jepang eksekusi pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan hukuman gantung² sebagaimana diatur dalam pasal 11 KUHP:

¹ Dr. Anadi, S.H. dan Andi Sumangelipu, S.H. *pidana mati di indonesia dan masa lalu, kini dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Cet Ke-1, hal. 27.

² Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada, 1985), Cet Ke-1, hal. 58.

Ketika perang dunia 11 berlangsung (masa pendudukan Jepang) di Indonesia mengalami masa peralihan. Dalam masa ini ada dua peraturan hukum pidana yang berlaku yaitu WvSNI (KHUP Hindia Belanda) dan peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah bala tentara Jepang (Osamu Gunrei No. 1) yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1942. pasal 6 Osamu Gunrei No. 1 tersebut menyatakan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan bedil³ (ditembak mati). Sehingga terdapat dua aturan mengenai cara yang ditempuh dalam menjalankan eksekusi pidana mati yaitu dengan digantung (pasal 11 KUHP) dan ditembak sampai mati (pasal 6 Osamu Gunrei No. 1). Jika kejahatan (tindak pidana) yang dilaksanakan melanggar pasal KUHP maka pelaksanaan pidana mati dijalankan dengan cara digantung dan bila kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang dilakukan oleh pemerintah bala tentara Jepang (Osamu Gunrei No. 1) maka pelaksanaan pidana mati dijalankan dengan cara ditembak sampai mati.⁴

Pemerintah bala tentara Jepang pada tanggal 1 Juni 1944 mengeluarkan Undang-Undang (Gunrei Keizirei) tentang eksekusi pidana mati dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam pasal 5 yang tetap menempuh cara dengan ditembak mati, kecuali hal itu sulit dilaksanakan maka boleh menggunakan cara lain.⁵

Keadaan dualisme undang-undang itu berlangsung hingga beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, hingga keluar undang-undang No. 1 Tahun 1946. dengan berlakunya undang-undang ini maka aturan mengenai

³ Ahkiar Salmi, *loc. cit.*

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

eksekusi pidana mati di wilayah kekuasaan republik Indonesia diberlakukan pasal 11 KUHP. Dengan berlakunya undang-undang ini maka aturan mengenai eksekusi pidana mati di wilayah kekuasaan republik Indonesia diberlakukan pasal 11 KUHP. Sedangkan daerah yang dikuasai oleh Belanda berlaku *staatblad* 1945 No. 123 yang mengharuskan eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati⁶. Kemudian setelah negara kesatuan RI terbentuk, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 73 Tahun 1958 yang menetapkan berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah RI maka secara otomatis eksekusi pidana mati hanya dilakukan dengan cara digantung sebagai mana diatur pasal 11 KUHP.⁷

Cara pelaksanaan pidana mati yang dilakukan terhadap terpidana yang terkena ancaman pidana mati menurut KUHP di atas, lama kelamaan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan jiwa revolusi Indonesia, dirasakan kurang manusiawi dan dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila (terutama sila ke dua: kemanusiaan yang adil dan beradab) sehingga sukar dilaksanakan. Alasan lain adalah sulitnya mencari *algojo*. Maka lahirlah *penpres* No. 2 Tahun 1964 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang No. 5 Tahun 1969 dan berlaku hingga sekarang, tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, baik yang telah dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum maupun militer, yang dalam pasal 1 disebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai

⁶ *Ibid.*, hal. 60.

⁷ *Ibid.*.

mati.⁸ Dengan cara ini orang yang melaksanakan pelaksanaan (eksekusi) pidana mati tidak terlalu merasa tertekan mentalnya, dan sangat cepat membawahkan kematian.

Di Indonesia pernah diterapkan eksekusi pidana mati, antara lain terhadap Kusni Kasdut (yang melarikan diri dari penjara setelah membunuh dan merampok museum di Jakarta dan kemudian menembak alat negara di Semarang ketika hendak ditangkap) dan pada tanggal 19 Juli 2008, tiga terpidana mati, (Sumiarsi dan Sugeng) dieksekusi di Jawa Timur, dan satu lagi (Tubagus Maulana Yusuf alias Dukun Usep) dieksekusi di Lebak Banten. Unikanya, ketiga pidana mati sebelumnya dipenjara dengan durasi yang sangat jauh berbeda. Sumiarsi dan Sugeng, ibu dan anak terlibat pembunuhan keluarga Letkol Purwanto pada 13 Agustus 1988, telah mengalami nyaris dua puluh tahun penjara, sebelum akhirnya dieksekusi. Sebaliknya, Dukun Usep, yang terbukti membunuh delapan orang kliennya pada 2006-2007, baru mengalami 1 tahun penjara saja sebelum akhirnya dieksekusi.⁹

Disini penulis bisa menganalisa bahwa sejarah pelaksanaan pidana mati di Indonesia telah banyak mengalami perubahan undang-undang tentang pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia, mulai pada masa pendudukan Belanda pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan WvSNI (KUHP Hindia Belanda) dan pada pasal 11 KUHP. Dan juga pada masa Jepang pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara di bedil (tembak mati) sesuai dengan (pasal 6 Osamu Gunrei No. 1).

⁸ Ahkiar Salmi, *loc. cit.*

⁹ <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/11/legitimasi-dan-manajemen-eksekusi-mati.html>.

Masa proklamasi kemerdekaan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan pasal 11 KUHP dan sampai pada akhirnya lahirnya penpres No. 2 Tahun 1964 mengatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang No. 5 Tahun 1969 mengatakan pelaksanaan pidana mati tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden dan berlaku hingga sekarang. Disini penulis mengharapkan juga hendaknya pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dilakukan dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan

B. Bagaimana Analisis Terhadap Pidana Mati Dalam Hukum Positif

Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah

1. Pandangan hukum Islam tentang pidana mati di Indonesia

Sesungguhnya dengan tetap adanya pidana mati dalam hukum positif Indonesia, telah melanggar konstitusi dasar Indonesia yakni UUD 1945 pasal 28 I butir 1 (amandemen kedua) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dan ini juga merupakan salah satu alasan yang dikemukakan pihak yang kontra terhadap pidana mati. Karena itu sesungguhnya keberadaan pidana mati sendiri masih perlu dikaji kembali apakah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Salah satu sumber nilai yang dapat dijadikan pijakan untuk mengkaji keberadaan pidana mati di Indonesia adalah hukum Islam, yang secara lebih khusus lewat hukum

pidana Islam. Nilai-nilai hukum pidana Islam pula yang menjadi salah satu sumber nilai dalam rancangan KUHP.

Dalam hukum pidana Islam, tentang sanksi atau hukuman diberikan secara setimpal. Dasarnya adalah al-Qur'an surat al-Maa'idah:5 yang berbunyi "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."¹⁰

Maka dapat diambil kesimpulan dari beberapa hukum pidana mati di Indonesia yaitu kejahatan terhadap keamanan Negara, Pembunuhan dengan berencana, Pencurian yang menyebabkan kematian, dan kejahatan di laut yang menyebabkan kematian. Maka dari kejahatan yang dapat diancam pidana mati di Indonesia sesuai dengan pandangan hukum islam berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dalam hukum islam, tentang sanksi atau hukuman diberikan setimpal dengan perbuatan yang dilakukanny berdasarkan al-Qur'an surat al-Maa'idah : 5.

Dan lain hal nya dengan kejahatan yang dilakukan seperti kejahatan yang dilkukan seperti terorisme dan narkoba manurut pandangan

¹⁰ <http://ekajazzlover.wordpress.com/2009/01/16/pidana-mati-dalam-pandangan-hukum-pidana-islam/>.

hukum islam. Dan bagaiman pandangan hukum islam tentang kejahatan terorisme di Indonesia. Selanjutnya mari kita cermati dan kita tela'ah kembali ajaran Islam, agama yang diridlai Allah SWT, sebagai petunjuk bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia yang sedang kita jalani sekarang ini, maupun kebahagiaan hidup yang haqiqi di akhirat kelak.

Allah SWT mengutus nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam di tengah-tengah manusia ini sebagai rahmat, dan merupakan suatu kenikmatan yang besar bagi manusia bukan suatu mushibah yang membawa malapetaka. Allah SWT berfirman dalam surat al-Anbiyaa' : 107. Setelah kita cermati kembali tentang dinul Islam sekaligus peribadi Rasulullah SAW yang diamanati oleh Allah SWT untuk menyebarkan dinul Islam ke seluruh ummat manusia, maka jelas sekali bahwa terorisme sama sekali tidak dikenal, bahkan bertolak belakang dengan ajaran Islam.

Terorisme dengan menggunakan kekerasan, kekejaman serta kebengisan dan cara-cara lain untuk menimbulkan rasa takut dan ngeri pada manusia untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Islam dengan lemah-lembut, santun, membawa kabar gembira tidak menjadikan manusia takut dan lari, serta membawa kepada kemudahan, tidak menimbulkan kesusahan, dan tidak ada paksaan.

Islam adalah agama rahmatan lil'alamiin, jadi tidak ada pemahaman bahwa merusak dan membunuh orang yang tidak bersalah itu jihat, apapun alasananya, Kecuali Pemahaman orang-orang yang sesat, dan Semoga citra Islam tidaklah rusak hanya karena pemahaman kelompok pengecut (teroris) namun tetap terjaga abadi selamanya.¹¹

Dan bangaiman padangan Islam terhadap kejahatan narkoba di Indonesia yang bisa di hukum mati. Secara tekstual Islam tidak menyatakan bahwa narkoba itu hukumnya haram, akan tetapi melihat dampak penyalahgunaan dari narkoba itu sangat membahayakan, lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, maka Islam memutuskan bahwa narkoba itu hukumnya haram sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah: 219.

Narkoba tidak hanya sekedar membuat mabuk, tetapi narkoba membuat syarafnya error bagi yang menyalahgunakan. Oleh karena itu narkoba harus di jauhi dengan sejauh-jauhnya. Melihat bahaya narkoba yang sangat besar, maka Allah SWT memerintahkan agar sesuatu yang dapat membahayakan seperti minuman keras, narkoba dan lain-lainnya itu supaya di jauhi. oleh karena itu narkoba mempunyai sifat merusak melebihi khamr, sehingga pengguna (ganja, putaw, ekstasi, kokain dan sejenisnya) yang meracik, penanam, pemproses, penyimpanan, penjual, pembeli bahkan

¹¹ <http://mta-online.com/v2/2009/08/22/terorisme-dalam-pandangan-islam/>

yang menyuguhkan serta orang-orang yang mau disuguhi, semua dilaknat Allah dan dosa. Islam memandang narkoba adalah haram hukumnya, memang ada manfaatnya tetapi ada juga mudharatnya, namun kerugiannya dan mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Dengan demikian bagi pengguna narkoba, taubat artinya berhenti, tidak menggunakan atau memakai, menyalahgunakan dan meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan narkoba secara konsisten. penyalahgunaan narkoba adalah suatu kedzaliman, kebodohan, mengundang penyakit yang merusak jasmani dan rohani bagi pemakainya. Maka kita harus meninggalkan, menghindari dan tidak mengulangi lagi, dengan berdo'a kepada Allah SWT.¹²

Maka dapat diambil kesimpulan kejahatan narkoba menurut islam tidak di hukum mati sedangkan menurut hukum pidana Indonesia kejahatan seperti narkoba bisa dihukum mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Mengenai Hukum Positif dan Hukum Islam

Pelaksanaan pidana mati dalam hukum positi telah diatur dalam undang-undang hukum acara pidana KUHAP), yang tercantum dalam pasal 271 yang berbunyi:

"Dalam hal pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang

¹² <http://id.cosmotopic.com/4500361129-narkoba-dalam-paradigma-islam>

Dan juga dikuatkan oleh undang-undang nomor 5 tahun 1969 yang tertuang dalam pasal 9 juga disebutkan:

"Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden"

Dan juga dalam pelaksanaan hukum Islam di kuatkan juga berdasarkan Q.S. al-Baqarah: 194

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: *"oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu"*

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

Artinya: *"Dan jika kau memberika balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan padamu. (Q.S. an Nahl: Nahl: 126)*

Serta hadits nabi:

ما حير بين الأمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن أثماً

Artinya: *"Tiadalah disuruh memilih antara dua perkara kecuali nabi memilih yang lebih mudah"*¹³

Serata kaidah yang berbunyi:

ما ضاق شئ إلا التسع

¹³ HR. Bukhori.

Artinya: “Tiadalah sempit, melaikan dia menjadi luas.”¹⁴

Dan kaidah yang menyatakan:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: “Kemadlaratan yang lebih keras dihilangkan dengan kemadlaratan yang lebih enteng”¹⁵

Dalam masalah pelaksanaan hukum positif dan hukum Islam terdapat titik temu dan titik perbedaan sebagai berikut:

1) Titik Temu:

- a. Alasan yang melatar-belakangi lahirnya undang-undang No. 5 tahun 1969 relevan dan sesuai dengan cirri, watak dan sifat hukum Islam yaitu dinamis (dapat mengikuti perkembangan zaman), menciptakan kemasalahatan manusia dan menjunjung tinggi azas kemanusiaan, memudahkan, mengenal adanya nasakh, mansukh dan rukshoh, dan memberantas serta menghindari kezaliman (penganiayaan/ kekejaman).
- b. Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak “ditembak sampai mati” berdasarkan alasan bahwa cara itu sangat mempercepat kematian pada hukum positif adalah sesuai dengan prinsip yang dipengang oleh hukum pidana Islam.
- c. Wewenang/ kekuasaan melaksanakan pidana mati ditangan penguasa (permerintahan) demi menghindari pelaksanaan pidana mati yang berlebihan, mencegah tindakan main hakim sendiri,

¹⁴ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Cet Ke-1, hal. 119.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 456.

mencega timbulnya permusuan dan sebagainya sama-sama diakui dalam hukum pidana Islam dan hukum positif (yang dalam hal ini dipengang oleh jaksa/ jaksa tinggi atau jaksa tentara/ oditur militer di lingkungan peradilan militer).

- d. Aspek-aspek yang tercakup dalam tujuan penjatuhan pidana mati antara lain (1) pendidikan dan pengajaran, (2) pencegahan (prenvensi), (3) mempertahankan dan memperbaiki tata tertib masyarakat, (4) perlindungan masyarakat, dan (5) pengimbalan/ pembalasan sama-sama dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

2) Titik Perbedaan:

- a. Hukum pidana positif seperti yang diatur dalam undang-undang No. 5 tahun 1969 hanya mengenal satu cara maupun alat dalam pelaksanaan pidana mati. Sedang hukum pidana Islam mengenal lebih dari satu cara atau alat dalam pelaksanaan pidana mati sesuai dengan sifat dan kualitas kejahatan, kadar asasinya hak-hak manusia dan norma yang di langgar serta akibat buruk yang ditimbulkannya sehingga memenuhi asas perimbangan dan keadilan.
- b. Bagi hukum Islam pelaksanaan pidana mati dilakukan didepan umum (tempat terbuka) dengan tujuan memberikan pelajaran dan pendidikan pada masyarakat agar dapat mencegah timbulnya kejahatan. Dalam hal ini hukum positif memiliki perbedaan yaitu

menjalankan pelaksanaan pidana mati di tempat tertutup (tidak di muka umum).

- c. Dalam hukum pidana Islam terdapat aturan diat/ denda (pemaafan dari wali korban) dan syarat taubat bagi terpidana yang mana persyaratan ini tidak di jumpai dalam pelaksanaan pidana mati pada hukum pidana positif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber data dan analisis penulisan, maka dapat diambil kesimpulan sebuah kesimpulan, yaitu:

1. Bagaimana sejarah perubahan yang mendorong perubahan pelaksanaan pidana mati

Sesudah proklamasi kemerdekaan, hingga keluar undang-undang No. 1 tahun 1946. dengan berlakunya undang-undang ini maka aturan mengenai eksekusi pidana mati di wilayah kekuasaan republik Indonesia diberlakukan pasal 11 KUHP. Dengan berlakunya undang-undang ini maka aturan mengenai eksekusi pidana mati di wilayah kekuasaan republik Indonesia diberlakukan pasal 11 KUHP. Sedangkan daerah yang dikuasai oleh belanda berlaku staatsblad 1945 No. 123 yang mengharuskan eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati kemudian setelah negara kesatuan RI terbentuk, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 73 tahun 1958 yang menetapkan berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah RI maka secara otomatis eksekusi pidana mati hanya dilakukan dengan cara digantung sebagaimana diatur pasal 11 KUHP

2. Bagaimana Analisis Terhadap Pidana Mati Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah

Maka dapat diambil kesimpulan dari beberapa hukum pidana mati di Indonesia yaitu kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan dengan berencana, pencurian yang menyebabkan kematian, dan kejahatan di laut yang menyebabkan kematian. Maka dari kejahatan yang dapat diancam pidana mati di Indonesia sesuai dengan pandangan hukum Islam berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dalam hukum Islam, tentang sanksi atau hukuman diberikan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan al-Qur'an surat al-Maa'idah : 5.

Terorisme dengan menggunakan kekerasan, kekejaman serta kebengisan dan cara-cara lain untuk menimbulkan rasa takut dan ngeri pada manusia untuk mencapai tujuan. Sedangkan Islam dengan lemah-lembut, santun, membawa khabar gembira tidak menjadikan manusia takut dan lari, serta membawa kepada kemudahan, tidak menimbulkan kesusahan, dan tidak ada paksaan.

Islam adalah agama rahmatan lil'alamiin, jadi tidak ada pemahaman bahwa merusak dan membunuh orang yang tidak bersalah itu jihat, apapun alasannya, kecuali Pemahaman orang-orang yang sesat, dan semoga citra Islam tidaklah rusak hanya karena pemahaman kelompok pengecut (teroris) namun tetap terjaga abadi selamanya

Narkoba tidak hanya sekedar membuat mabuk, tetapi narkoba membuat syarafnya error bagi yang menyalahgunakan. Oleh karena itu narkoba harus

dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Maka dapat diambil kesimpulan kejahatan narkoba menurut Islam tidak di hokum mati sedangkan menurut hokum pidana Indonesia kejahatan seperti narkoba bisa di hukum mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku

B. Saran

1. Apabilah hukum mati dimaksudkan untuk membuat jera dan memberikan dampak psikologis pada masyarakat, maka hendaklah dilaksanakan di depan publik dan disertai dengan peran media massa untuk pencitraan dan mengkonstruksi pemikiran masyarakat terhadap pelaksanaan pidana mati tersebut, dengan cara mempublikasikannya melalui media, baik media elektronik maupun media cetak dan juga menyebutkan dimana tempat pelaksanaannya
2. Menurut undang-undang dengan membuat pelaksanaan pidana mati itu dilaksanakan didepan publik disertai dengan peran media massa dalam mempublikasikannya
3. Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah jangan terlalu lama menunda pelaksanaan pidana mati tersebut, agar pidana yang dijatuhkan menjadi berita terbaru dan hangat bagi masyarakat dan bukan menjadi berita yang sudah kadaluwarsa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. djazul, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), Cet. Ke-2
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), Cet. Ke-1
- Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada, 1985), Cet. Ke-1
- Ahmad Wardhi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), Cet. Ke-2
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2001), Cet. Ke-2
- Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke-2
- _____, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) Cet. Ke-5
- _____, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet. Ke-1
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Yayasan Prenada Media, 2006), cet Ke- 1
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: yayasan penyelenggaraan peterjemahan/dan tafsiran alqu'an, 1971), cet Ke- 1
- Djoko Prakoso, *Pidana Mati Diindonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Cet. Ke-1

Dr. Anadi, SH. Dan Andi Sumangaelipu, S.H., *Pidana Mati Diindonesia Dan Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1984), Cet. Ke-1

J.S Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), Cet. Ke-1

M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Cet. Ke-2

Moejljatno, KHUP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), (Jakarta Bumi Aksara, 2003), Cet. Ke-21

Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'I* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), Cet. Ke-1

Nasrullah, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Padang :2002), Cet. Ke-2

Nasrullah Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta : PT. Logos, 1997), Cet. Ke-1

Nestafa adalah sebuah rasa gundah gulana, rasa sedih atau kegundahaan. Lihat: Burhani MS, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, tt),Cet. Ke-1

Nuruddin, *Hubungan Media Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-2

Prasetyo Irwan, *Penelitian Kualitatif Dan Kwantitatif*, (Jakarta: DIA FISIF UI,2006), Cet. Ke-3

- Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-2
- Ren G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), Cet. Ke-1
- Riyono Pratiko, *Lingkar-Lingkar Komunikasi*, (Bandung: Alumni, 1982), Cet. Ke-1
- Sa'di Abu Habieh, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, (jakarata: Pustaka Firdaus, 1997), Cet. Ke-1
- Sahal Machfudz, *Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), Cet. Ke-1
- Sugandhi, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), Cet. Ke-3
- Syeikh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), Cet. Ke-2
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-2